

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DALAM PEMBERDAYAAN PENGRAJIN SARUNG SAMARINDA DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Rini Tumiar Nainggolan¹

Abstrak

Rini Tumiar Nainggolan, Peran Dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang. Dibawah bimbingan Bapak Drs. Daud Kondorura, M.Si dan Bapak Dr. M. Zaini, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan peran yang dilakukan serta hambatan yang dihadapi dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan pengrajin sarung samarinda di kecamatan samarinda seberang. Indikator penelitian ini antara lain: 1) koordinasi; 2) pembinaan; 3) Monitoring dan Evaluasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field work research, analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda sudah berusaha melakukan upaya pemberdayaan terhadap pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang melalui pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Dalam upaya pemberdayaan tersebut Dinas Koperasi dan UKM menyusun berbagai program pemberdayaan namun program-program tersebut tidak semuanya berjalan dengan baik.

Adapun yang menjadi saran adalah sebaiknya Dinas Koperasi dan UKM lebih meningkatkan perannya demi tercapainya tujuan pemberdayaan untuk menjadikan pengrajin sarung samarinda yang mandiri serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerajinan sarung samarinda sehingga perkembangan ekonomi kerakyatan dalam hal ini pengrajin sarung samarinda dapat terwujud dan sejalan pada otonomi daerah Samarinda

Kata Kunci: *Peran Dinas Koperasi dan UKM, pemberdayaan dan pengrajin sarung samarinda.*

Pendahuluan

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan salah satu prioritas utama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, karena keberadaan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rinitumiar.nainggolan@gmail.com

usaha kecil dan menengah merupakan wujud kehidupan sebagian rakyat Indonesia dan pada saat terjadi krisis ekonomi, sektor ini ternyata lebih mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dibandingkan usaha besar. Selain itu sektor industri merupakan salah satu sektor yang cukup strategis bagi suatu daerah untuk menanggulangi masalah pengangguran dan sebagai aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi ekonomi dimana industri kecil dihadapkan pada persaingan pasar global, Pengrajin sarung samarinda juga mengalami ketatnya persaingan sehingga walau demikian tingginya keinginan pengrajin untuk mengembangkan usahanya namun masih belum mampu memberikan dampak ekonomi bagi lingkungannya. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin yang masih sangat kompleks seperti keterbatasan modal untuk melakukan ekspansi usaha yang lebih besar, ketersediaan bahan baku benang masih bergantung dengan benang impor dari Cina, pemasaran yang masih rendah, pilihan motif sarung yang kurang variatif, kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari teknik pembuatan sarung asli samarinda sehingga pada saat ini pengrajin sarung dominan para orangtua.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Pengrajin Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang.”

Kerangka Dasar Teori

Peran Pemerintah

Menurut soekanto (2005 : 137) peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran juga dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur dan ditimbulkan suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu organisasi yang mudah dikenal. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Secara umum fungsi pemerintah mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah H. Nurul Aini dalam Haryanto dkk, (1997 : 36-37) yaitu:

1. Fungsi Pengaturan

2. Fungsi Pelayanan
3. Fungsi Pemberdayaan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan peraturan walikota Samarinda Nomor 23 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi serta tata kerja organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2008. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang mempunyai fungsi pada bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda antara lain:

1. Tugas pokok : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan penetapan dan pengesahan kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi dan UKM, pembinaan , penyuluhan, dan penumbuhan iklim usaha serta pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan koperasi dan UKM yang searah dengan kebijakan umum daerah dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Fungsinya antara lain:
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan program operasional koperasi dan UKM dalam upaya pembinaan, pengembangan koordinasi monitoring evaluasi penyelenggaraan kegiatan urusan koperasi dan UKM sesuai norma standar dan prosedur yang berlaku dan searah kebijakan umum daerah.
 - b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM serta pelayanan umum pelaksanaan kebijakan dan pengesahan pembentukan, penggabungan, peleburan, serta pembubaran kelembagaan koperasi, memfasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian, perubahan anggaran dasar usaha simpan pinjam, koperasi sesuai dengan pedoman PEMDA serta pengawasan dan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.
 - c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan pemberdayaan koperasi dalam upaya penciptaan usaha simpan yang sehat, pembinaan dan penyuluhan kopersi dalam pembuatan laporan

tahunan koperasi dan unit simpan pinjam, memfasilitasi pelaksanaan dan penyelesaian akibat pembubaran koperasi dan unit simpan pinjam, pemberian sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya, serta pengembangan iklim, kondisi yang mendorong pertumbuhan pemasyarakatan koperasi, pemberian bimbingan dan kemudahan serta perlindungan kepada koperasi.

- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penempatan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam pertumbuhan iklim usaha dengan memfasilitasi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, pesaing, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha kecil baik produksi, pasar, sumber daya manusia, dan teknologi serta memfasilitasi akses pinjaman dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah.
- e. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelaporan hasil kegiatan program strategi dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh kepala daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ialah berbagai kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menyelenggarakan proses sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan.

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah kata yang bersifat menarik bagi masyarakat karena dapat memberikan sesuatu dalam merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga dapat dipahami bahwa pemberdayaan mengandung arti bahwa seseorang berada dalam pengendalian diri sendiri dan lingkungannya yang memperluas kemampuan dan wawancaranya dan mengevaluasi diri sendiri sampai pada tingkat prestasi dan kepuasan yang lebih besar. Pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial ekonomi dan politik sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat (Kindervatter 1979: 13). Penulis dapat menggambarkan bahwa pemberdayaan

dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan (power) atau kemampuan dan proses pemberian daya kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya sehingga dapat memperluas kemampuan, wawasan serta mampu mengevaluasi diri sendiri sampai pada tingkat prestasi dan kepuasan yang lebih tinggi.

Koordinasi

Kata koordinasi berasal dari kata “Co” dan “Ordinare” yang berarti To Regulate. Dilihat dari pendekatan empirik, dikaitkan dengan segi etimologi koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order not sunordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain, sementara di sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau benda-benda agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan, dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Pembinaan

Pengertian pembinaan menurut Widjaja (1986:139) adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali mendirikan, munumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan akhirnya mengembangkan. Menurut UU RI Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah BAB VI pembinaan dan pengembangan usaha pasal 16 ayat 1 adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

1. Produksi dan pengolahan
2. Pemasaran
3. Sumber daya manusia
4. Desain dan teknologi

Dengan demikian maka pembinaan adalah suatu proses pengembangan diri yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan terhadap orang atau kelompok yang lemah melalui tahap mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan akhirnya

mengembangkannya menjadi insan yang mandiri dan dapat berguna bagi bangsa dan negara.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan suatu kegiatan memantau yang dilakukan terhadap penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sebagai usaha untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan. Menurut Suharto (2005:119) evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal dua tipe evaluasi, yaitu: *on-going evaluation* atau evaluasi terus menerus dan *ex-post evaluation* atau evaluasi akhir. Tipe evaluasi pertama dilaksanakan pada interval periode waktu tertentu, tipe evaluasi kedua biasanya dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana. Evaluasi adalah pemantauan yang dilakukan pada saat perencanaan dan pelaksanaan program untuk menilai dan mengidentifikasikan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada penyusunan dan pelaksanaan program yang telah berjalan.

Pengrajin

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia (2004 : 672) Pengrajin ialah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan. Ada pengrajin ukir, pengrajin batik, pengrajin wayang, pengrajin perak, dan sebagainya. Barang-barang kerajinan itu tidak dibuat dengan mesin, melainkan dengan tangan, sehingga sering disebut barang kerajinan tangan.

Definisi Konsepsional

Konsepsional adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan di teliti, istilah konsepsional merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dan teori yang kadang-kadang masih abstrak, sehingga diperlukan Definisi konsepsional.

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan definisi konsepsional yang menyangkut judul skripsi agar mempermudah dalam memahami maksud pembahasan yaitu: Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam pemberdayaan pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang adalah berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan proses koordinasi, pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang sebagai usaha untuk menumbuh kembangkan kekuatan (*power*) pengrajin agar mampu bergerak secara mandiri dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif yang diterapkan untuk menggambarkan keadaan-keadaan secara nyata tentang Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pengrajin Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang dalam hal koordinasi, pembinaan serta monitoring dan evaluasi.

Adapun menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

Jadi dalam Artikel ini penulis berupaya memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang kondisi yang ada pada lokasi penelitian mengenai objek yang diteliti, dimana dikemukakan juga fakta yang berhubungan dengan kondisi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang ada akan diambil suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang

Peranan berasal dari kata peran, mengetahui peranan sangatlah penting bagi suatu organisasi terlebih yang mempunyai kegiatan operasional yang berskala besar, sehingga mengetahui tugas dan kewajibannya yang harus dikerjakan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi dari peran yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menggambarkan bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam pemberdayaan pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang..

Berdasarkan uraian diatas maka yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu terkait 3 fokus diantaranya: Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang.

1. Koordinasi

koordinasi adalah suatu kerjasama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain guna

terciptanya suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Hal tersebut sesuai dengan fungsi Dinas Koperasi dan UKM diantaranya, pelaksanaan pengkoordinasian penetapan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam penumbuhan iklim usaha dengan memfasilitasi pendanaan/ penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, pesaing, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha kecil baik produksi, pasar, sumber daya manusia dan teknologi serta memfasilitasi akses pinjaman dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah.

Pelaksanaan koordinasi perencanaan serta pelaksanaan program pemberdayaan pengrajin sarung samarinda sudah berjalan lancar dimana dalam perencanaan maupun pelaksanaan program-program pemberdayaan pengrajin sarung samarinda ini Dinas Koperasi dan UKM tidak bekerja sendiri tetapi juga melakukan koordinasi dengan pihak lain baik antar bidang maupun antar instansi misalnya dengan dinas industri dan perdagangan, dinas pasar, dinas Kebudayaan dan pariwisata juga dengan pemerintah daerah maupun dengan pihak swasta.

2. Pembinaan

pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali mendirikan, munumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan akhirnya mengembangkan. Adapun tujuan dari pembinaan adalah agar mereka tidak rendah diri dan dapat berguna bagi diri mereka sendiri, keluarga maupun bangsa dan negara dengan modal pendidikan dan keterampilan yang diperoleh mereka sehingga dapat mandiri dan hidup secara wajar.

Menurut UU RI Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah BAB VI pembinaan dan pengembangan usaha pasal 16 ayat 1 adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi serta memediator pengembangan usaha.

a. Pembinaan pengrajin melalui pelatihan peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen

Dinas Koperasi dan UKM sebagai pembina dan pengembang usaha kecil menengah dalam menjalankan tugasnya, berperan memberikan pelatihan-pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen pelaku UKM dalam menjalankan usahanya dan sebagai penghubungnya yaitu dilaksanakan oleh bidang kelembagaan yakni seksi organisasi dan manajemen Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda sesuai dengan keputusan walikota Samarinda nomor 023 tahun 2008 pasal

764. Dinas Koperasi dan UKM dalam memberikan pelatihan pemahaman organisasi dan manajemen Koperasi terhadap pengrajin masih belum merata sehingga masih banyak pengrajin yang masih kesulitan dalam memahami prinsip organisasi dan manajemen dalam menjalankan usaha sehingga mereka masih kesulitan akses-akses dalam memperoleh modal dan jaringan usaha serta pemasarannya.

b. Pembinaan pengrajin melalui peningkatan akses permodalan

Dalam pengertian ekonomis modal adalah barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor produksi lain digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa baru. Dalam proses produksi modal merupakan faktor produksi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan hasil produksi. Peningkatan modal akan berpengaruh pada investasi dalam sektor industri, sehingga akan mendorong kenaikan output

Dinas koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam hal pemberian modal dan pendanaan industri hanya bertindak sebagai fasilitator bagi pengrajin yang membutuhkan dana atau modal tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha kerajinan sarung samarinda. peranan modal dalam dunia industri sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha atau industri yang dijalankan oleh karena itu pengrajin sarung samarinda yang masih kurang dalam permodalan sangat terbantu dengan adanya fungsi fasilitator daripada Dinas Koperasi dan UKM sebagai penghubung atau jembatan dalam upaya permodalan tetapi program ini belum dirasakan oleh semua pengrajin karena masih adanya keraguan dari pengrajin terhadap kelancaran usaha sarung samarinda ini. Sebagai wujud pengembangan UKM ekonomi kerakyatan harapannya pemerintah bisa lebih memperhatikan kebutuhan para pengrajin dalam meningkatkan hasil industri sehingga dapat terkontrol dan selalu berkesinambungan dan bersinergi terhadap output yang dihasilkan nantinya.

c. Pembinaan pengrajin melalui peningkatan akses pasar

Dalam mengembangkan UKM, diperlukan pengembangan jaringan usaha yaitu peningkatan perluasan akses pasar. Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan pengrajin melalui peningkatan akses pasar ini dilakukan melalui kegiatan promosi dan penyediaan informasi pasar bagi pengrajin serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengrajin. Untuk itu pengembangan akses pasar ini dilakukan oleh bidang pemberdayaan UKM melalui seksi pengembangan jaringan Usaha dan Kemitraan UKM.

Hal ini berdasarkan keputusan Walikota Nomor 023 tahun 2008 tentang rincian tugas dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Samarinda yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 740. pelaksanaan pembinaan pengrajin sarung samarinda melalui peningkatan akses pasar dapat dirasakan oleh para pengrajin sarung samarinda di kecamatan samarinda seberang berupa pelaksanaan pameran baik ditingkat daerah, ditingkat nasional bahkan sampai ke luar negeri sehingga sebagian besar pengrajin tidak lagi merasa kesulitan untuk memasarkan hasil kerajinan mereka selain itu juga dengan adanya fungsi koordinasi dari Dinas Koperasi dan UKM dengan Pemerintah dan Dinas lain melalui pelaksanaan program-program yang dianggap mendukung bagi perkembangan kerajinan sarung samarinda.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (ME) adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda yaitu kata Monitoring dan Evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan program pemberdayaan hendaknya Dinas Koperasi dan UKM melakukan evaluasi karena evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan serta mempermudah dalam perencanaan program berikutnya.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan pengrajin sarung samarinda oleh Dinas Koperasi dan UKM tidak berjalan dengan lancar hal ini diakibatkan kurangnya komunikasi antara pihak pengrajin sebagai pihak yang merasakan langsung dampak program yang dilakukan dengan Dinas Koperasi dan UKM sebagai pihak pembuat program pemberdayaan sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk membuat rencana selanjutnya. Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil perencanaan yang dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penulis tentang Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Pengrajin

Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang dan dihubungkan dengan tujuan penelitian maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan bidang lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan pengrajin Sarung Samarinda berlangsung dengan baik.
2. Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam pembinaan pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang melalui peningkatan kemampuan organisasi manajemen belum berjalan dengan maksimal.
3. Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam pembinaan pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang melalui peningkatan terhadap akses sumber modal ditempuh melalui peran sektor jasa keuangan yaitu pemerintah dan swasta dengan melakukan pengajuan kredit ke Bank maupun pengajuan proposal permohonan bantuan bagi para pengrajin.
4. Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam pembinaan pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang melalui peningkatan akses pasar dilakukan melalui kegiatan promosi berupa penyelenggaraan pameran namun kegiatan ini masih kurang maksimal karena penyelenggaraannya hanya dua tahun sekali.
5. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM terhadap program pemberdayaan pengrajin Sarung Samarinda berjalan dengan kurang baik diakibatkan jumlah SDM di kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda yang menangani pemberdayaan UKM tidak sebanding dengan jumlah UKM yang harus ditangani.
6. Hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam pemberdayaan pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang berupa kendala internal yaitu kurangnya jumlah aparatur yang memberikan bimbingan ataupun pelatihan kepada pengrajin, selain itu ada juga kendala eksternal yaitu iklim usaha yang belum kondusif serta kurangnya komunikasi dari pengrajin kepada Dinas Koperasi dan UKM yang mengakibatkan proses monitoring dan evalusai tidak berjalan dengan baik.

Saran

Melihat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Pengrajin Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan UKM perlu meningkatkan pelatihan tentang manajemen usaha yang benar kepada semua pengrajin sarung

samarinda sehingga pengrajin tidak hanya bisa membuat sarung saja tetapi juga bisa berkembang menjadi pengusaha sarung.

2. Dinas Koperasi dan UKM diharapkan menambah jadwal pameran sehingga semua pengrajin bisa mendapat kesempatan ikut dalam pameran tersebut.
3. Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda kurang memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik dilihat dari jumlah aparatur maupun infrastruktur yang tersedia oleh karena itu diperlukan program yang efektif serta efisien yaitu dengan meningkatkan kemampuan SDM aparatur pembina dalam layanan data dan informasi berbasis web (teknologi dan informatika).
4. Perlu adanya penambahan pegawai fungsional Dinas Koperasi dan UKM sehingga dalam pelaksanaan program pemberdayaan pengrajin sarung Samarinda dapat berjalan dengan baik
5. Dinas koperasi dan UKM diharapkan lebih meningkatkan komunikasi dengan para pengrajin sehingga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan pengrajin sarung samarinda dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2007. *Membangun Desa Partisipatif*. Bandung : Fokus Media.
- Arsyad, Lincolin. 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE - Yogyakarta.
- Handoko. 1992, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE - Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama.
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Administrasi pembangunan perkembangan praktisnya di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Manurung, Adler Haymans. 2007. *Bisnis UKM (Usaha Kecil Menengah)*, Jakarta : Buku Kompas.
- Manullang, 1991. *Pengembangan Pegawai*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Milles, Matthew, B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Yogyakarta.

- Rasyid, Muhammad Ryas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemanto, Wasty. 2006. *Pendidikan Wiraswasta*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Subandi. 2010. *Ekonomi Koperasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.
- Supriyadi, Dedi dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Supriyadi, Dedi dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Tambunan, 2001. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Tohar, Muhammad, 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius

Dokumen – dokumen :

- Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang – Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Industri Kecil
- Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda*.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 *Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda*

Sumber Internet :

- <http://www.karyabahari.com>. (diakses 25 Nopember 2014)
- <http://www.kabarbisnis.com>. (diakses 27 Nopember 2014)